



Laporan Percepatan Pembangunan Papua



PERIODE APRIL 2025

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat Daya





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Maret 2025 telah dilaksanakan dengan baik oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya maupun Anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

Pada bulan April 2025, arah dan fokus pelaksanaan kegiatan SHEK difokuskan pada kegiatan pendampingan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan serta rencana implementasi program-program strategis. Pendampingan ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan konsultasi, rapat koordinasi dan fasilitasi teknokratik lintas sektor, yang bertujuan untuk memastikan integrasi visi misi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Kegiatan-Kegiatan Strategis





KEGIATAN STRATEGIS 1

Pada tanggal **10 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya menghadiri kegiatan **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus Tingkat Kota Sorong Tahun 2025**.

Hasil kegiatan :

1. Masih terdapat pengusulan yang dilakukan oleh OPD tidak sesuai dengan persyaratan penganggaran bersumber dana Otsus seperti syarat penerima manfaat haruslah Orang Asli Papua
2. Masih terdapat perencanaan yang tumpang tindih antara OPD dengan kewenangan yang serupa
3. Penyusunan matriks usulan belum mengakomodir struktur matriks yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua
4. BP3OKP perlu melaksanakan kordinasi dan sinkronisasi lanjutan terhadap RAP untuk tiap jenis dan sumber penerimaan Otsus. Hasil dari sinkronisasi ini selanjutnya digunakan sebagai materi pada musrenbangsus pada tingkat provinsi
5. Kordinasi dan sinkronisasi terhadap RAP perlu dilakukan dengan melaksanakan identifikasi rencana program dan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan misi papua sehat, papua cerdas dan papua produktif
6. Buat program tepat sasaran
7. Program bantuan usaha perlu ada pelatihan dan pendampingan
8. Beri bantuan usaha lengkap dengan alat usaha
9. Perlu komunikasi dengan distrik dari opd

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Mengevaluasi dengan ketat hasil usulan dari masing-masing OPD serta memberi catatan sesuai dengan tata cara dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua
2. Memperhatikan proses yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua
3. Ada beberapa catatan rekomendasi yang sudah disiapkan Pokja Papua Produktif dalam rangka perbaikan rumusan program kegiatan Desk Papua Produktif
4. Setiap distrik harus mendata usulan masyarakatnya dengan dokumen pendukung seperti proosal agar diserahkan ke OPD untuk diinput menjadi sub kegiatan
5. OPD perlu memperhatikan setiap usulan selaras dengan RIPPP
6. OPD segera menginput semua sub kegiatan dalam aplikasi SIKD
7. Semua usulan yang diinput dalam SIKD agar dapat diketahui Oleh BP3OKP juga





KEGIATAN STRATEGIS 2

Pada tanggal **11 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama Panitia Pelatihan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

1. Penyampaian proposal telah dilaksanakan, dan selanjutnya BP3OKP (melalui pimpinan) melanjutkan proposal kegiatan kepada Gubernur Papua Barat Daya
2. BP3OKP pada prinsipnya sangat mendukung kegiatan ini karena sejalan dengan langkah kerja Pokja Papua Produktif untuk menyiapkan tenaga kerja yang handal dalam dunia kerja nanti
3. BP3OKP akan mengupayakan agar bisa dibantu dana oleh Gubernur PBD

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Melaksanakan koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua Provinsi Papua Barat Daya yang dilaksanakan di Kota Sorong
2. Panitia Pelatihan Kaka Jose (PKJ) segera menyerahkan proposal permohonan agar langsung diserahkan kepada Gubernur hari ini juga, mengingat ada agenda launching pendidikan sekolah gratis Kota Sorong bersama Gubernur
3. Anggota Pokja Papua Produktif memberi sumbangan sukarela agar panitia dapat menjilid proposal permohonan bantuan dana dalam kegiatan Pelatihan Kaka Jose





KEGIATAN STRATEGIS 3

Pada tanggal **11 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya menghadiri kegiatan **Rapat Koordinasi Program Pendidikan Sekolah Gratis Tingkat Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

Bahwa sejauh ini dalam pendampingan dan harmonisasi Program Sekolah Gratis bersama OPD Teknis Kota Sorong maupun dengan Disdik PBD terlaksanakan dengan baik dan berharap pertimbangan regulasi yang belum tepat dicarikan jalan keluarnya agar tidak menghambat pelaksanaan program sekolah gratis di Kota Sorong

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perlu Pelaksanaan SHEK Disdik Pendidikan Kota Sorong untuk Melihat bagaimana desain Final penggunaan Dana Otsus dalam Program Sekolah Gratis di Kota Sorong
2. Melaksanakan SHEK kepada Satuan Pendidikan dan Komite sebagai Perwakilan orang tua murid
3. Perlu perincian Program Sekolah Gratis sebagai Program Prioritas Strategis Bersama dengan Provinsi Papua Barat Daya





KEGIATAN STRATEGIS 4

Pada tanggal **15 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya menghadiri kegiatan **Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Se-Papua Raya**.

Hasil kegiatan :

Dari hasil raker dihasilkan 9 rekomendasi yaitu :

1. Penguatan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua
2. Penguatan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP)
3. Penguatan sistem tatakelola jaminan kesehatan
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
5. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
6. Penguatan Kolaborasi dan Kerja Sama Antar daerah
7. Peningkatan Pelayanan Publik dan Transformasi Digital
8. Perlindungan Ekologis dan KebUakan Afiriasi Sosial
9. Penegasan Kepemimpinan Papua dalam Arsitektur Pembangunan Nasional

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Rekomendasi yang dihasilkan dari Raker selanjutnya akan dikelompokan berdasarkan tujuan aspirasi baik itu kepada presiden atau kementerian/lembaga terkait
2. Perlu dibentuk tim yang menyiapkan konsep hasil rekomendasi selanjutnya akan diteruskan pada kementerian/lembaga terkait





KEGIATAN STRATEGIS 6

Pada tanggal **23 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Kunjungan ke Unimuda**.

Hasil kegiatan :

1. BP3OKP-PBD telah melaksanakan membangun komunikasi yang baik dengan Rektor Unimuda. Pada kesempatan berikutnya, BP3OKP perlu melaksanakan kegiatan kolaborasi seperti sosialisasi dan kuliah Umum dalam rangka meningkatkan pemahaman publik terutama mahasiswa akan pentingnya program otonomi khusus untuk mendorong pembangunan papua sehat, cerdas dan produktif
2. BP3OKP setuju untuk mengawal dan memberikan rekomendasi kepada Unimuda dalam rangka pengusulan Mobilier dan alat kesehatan pada Rumah sakit Unimuda

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi dan kuliah umum kepada mahasiswa. Waktu pelaksanaan ditentukan oleh pihak universitas
2. Akan ada kegiatan /kunjungan lanjutan BP3OKP ke Unimuda dengan tajuk BP3OKP Goes To Campus
3. BP3OKP akan mengawal setiap usulan yang datang dari Unimuda demi membantu pencerdasan generasi Papua Barat Daya





KEGIATAN STRATEGIS 7

Pada tanggal **23 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Koordinasi dengan Kemendikdasmen RI terkait Implementasi Permendikbudristek RI Nomor 44 Tahun 2023 di Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

Hasil koordinasi ini mendapatkan hasil bahwa, Implementasi Permendikbud 44 tahun 2023 telah siap dilaksanakan, Tim BP3OKP di Tiap Provinsi dapat melaksanakan fungsi SHEK dengan Pemda maupun LPTK agar tahun 2025 ini dimulakan

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Berikut Rencana TL yang kami harus lakukan adalah:

1. Melakukan SHEK dengan Pemda Kab/Kota dan LPTK,
2. Secara teknis Pokja Cerdas wajib mengkonfirmasi persiapan Pemnda Kab/Kota khusus persiapan pendanaannya





KEGIATAN STRATEGIS 8

Pada tanggal **23 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Koordinasi dan Konsultasi dengan Wamenkes dalam rangka Pendampingan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau**.

Hasil kegiatan :

1. Percepatan pembangunan di kabupaten Tambrau memerlukan dukungan optimal dari Pemerintah Pusat
2. Wakil Menteri Kesehatan memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada Bupati Tambrau namun Kabupaten Tambrau mempersiapkan SDM untuk memanfaatkan SarPras tersebut
3. Bupati Tambrau memohon dukungan tenaga Spesialis dari Kementerian Kesehatan dan akan dijawab dengan Tugus dokter Spesialis
4. Kabupaten Tambrau mempersiapkan Program Terbaik Hasil Cepat, RS Pratama Tambrau hingga menjadi RS Tipe C

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti :

1. Mempersiapkan SDM kesehatan sesuai dengan rencana perkembangan bidang kesehatan pada Kabupaten Tambrau
2. Memperbaiki sistem dan tata kelola pada aparatur sipil negara di Kab Tambrau





KEGIATAN STRATEGIS 9

Pada tanggal **24 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya menghadiri kegiatan **Audiensi Rencana Percepatan Pembangunan di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

1. Perlu mempertimbangkan Indeks Pembangunan Manusia agar perencanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan target peningkatan IPM. Program-program yang disusun menjadi lebih relevan serta sinergi dengan penganggaran dapat berjalan dengan baik
2. Menggunakan data yang terukur dengan Indikator capaian yang wajib diperhatikan sebagai pencapaian dalam pembangunan
3. Melakukan Fungsi Pendampingan Pemda Tambrau guna mendorong implementasi Program Percepatan misi Papua Sehat, Cerdas dan Produktif didukung dengan harmoni sosial

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Bupati perlu membangun iklim kerja yang memiliki etos dan loyalitas tinggi terhadap pembangunan yang berpihak kepada rakyat
2. Pimpinan OPD yang tidak mampu menerjemahkan visi dan misi Bupati hendaknya
3. Pendampingan secara Intens perlu dilakukan dengan OPD Teknis oleh Pokja Sehat, Cerdas dan Produktif agar program percepatan yang lokprinya di Kabupaten Tambrau dapat di laksanakan





KEGIATAN STRATEGIS 10

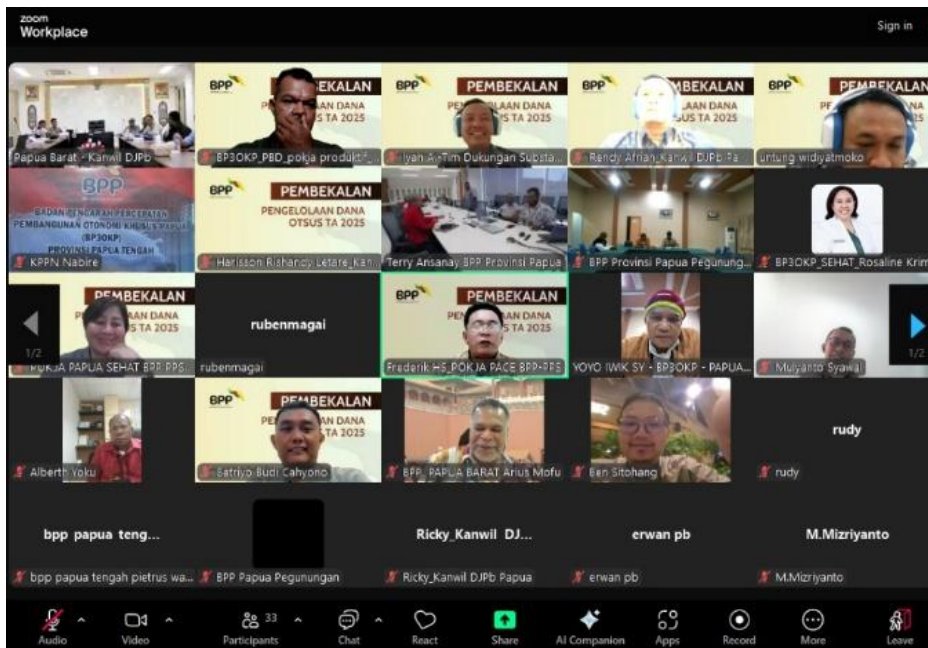
Pada tanggal **25 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya menghadiri kegiatan **Pembekalan Pengelolaan Dana Otsus TA 2025**.

Hasil kegiatan :

1. BPP memiliki peran dalam hal pelaporan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap tata kelola dana Otonomi Khusus
2. Adanya kesepahaman tentang tentang Pengelolaan Otsus di Tanah Papua dan harmonisasi regulasinya
3. Mengoordinasikan Tindak Lanjut yang dibutuhkan kepada pihak yang berkepentingan untuk pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penerimaan Dalam Rangka Otsus
4. Menerima Laporan Tahunan Penerimaan Dalam Rangka Otsus dari Provinsi dan Kota
5. Menggordinasikan dan mengarahkan pembinaan pengelolaa Penerimaan Dalam Rangka Otsus
6. Menggordinasikan dan mengarahkan pembinaanpengelolaan PenerimaanDalam Rangka Otsus
7. Menerima Laporan Hasil Pengawasan Penerimaan Dalam Rangka Otsus
8. Menggordinasikan dan mengarahkan pembinaan pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otsus
9. Menerima Hasil Evaluasi Penerimaan Dalam Rangka Otsus

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Melakukan fungsi Pelaporan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dengan daerah agar melaksanakan pengelolaan dana otsus dengan cermat
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas seperti ini sangat baik dilakukan, dan dapat dilakukan untuk semua Jenis TKD yang dik[terima oleh PBD. Dengan demikian anggota pokja lebih muda melaksanakan SHEK. Perlu ditetapkan sebagai program Rutin terutama mengikuti periode Salur Tahap I-III
3. BP3OKP perlu meningkatkan kordinasi dan komunikasi dalam rangka percepatan proses transfer ke daerah





KEGIATAN STRATEGIS 11

Pada tanggal **28 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi bersama PHLI (Papua Hope Language Institute)**.

Hasil kegiatan :

Secara umum programnya sangat baik, PHLI baiknya tidak hanya fokus pada persiapan studi ke LN untuk jurusan2 yang umum, tetapi baiknya mempersiapkan anak2 PAPUA untuk masuk pada jurusan-jurusan yang spesifik dan mungkin memiliki Ikatan Kedinasan dengan Pemda. Selain itu Proposal ini baiknya berisi ttd SPH juga sehingga Pemda dapat mempelajari secara keseluruhan untuk dipertimbangkan

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Perlu dikomunikasikan dengan Disdik PBD dan atau Kab/kota untuk menjadikan PHLI tetapi juga SPH sebagai lokasi untuk Studi Tiru dan atau Lokasi Pembelajaran Lainnya





KEGIATAN STRATEGIS 13

Pada tanggal **30 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya menghadiri kegiatan **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tambrau Tahun 2026**.

Hasil kegiatan :

1. Pagu Indikatif Anggaran dihitung menyesuaikan Pagu tahun 2025 yakni Rp. 1.232.803.000.000.000 yang tersebar pada 14 OPD dengan total kegiatan sebanyak 159 dikuar kegiatan Pokir
2. Bahwa menjadi kesepakatan Bupati bahwa program diutamakan adalah program strategis dan atau program percepatan sesuai arahan BP3OKP PBD (Note; Kurangi perencanaan yang tidak penting, harus fokus)
3. Bahwa Baik Pikir yang diserahkan kepada Bupati oleg DPR, tetapi juga usulan program ke Provinsi Papua Barat Daya di serahkan kepada Kepala Bapperida PBD melalui Sekretaris

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Beberapa rencana TL yang perlu dilakukan bersama dengan dengan Pemda Tambrau adalah ;

1. Pendampingan pelaksanaan Program Prioritas SHH, Sekolah terbuka dan program lainnya dengan OPD teknis, ini juga dilakukan oleh Pokja Sehat dan Produktif dengan OPD teknis lainnya
2. Dokumen Perencanaan perlu direview untuk dan dipantau penyelesaiannya agar dapat mempersiapkan Dokumen Syarat Salur





KEGIATAN STRATEGIS 14



Pada tanggal **30 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU RI**.

Hasil kegiatan :

Peninjauan kembali usulan peningkatan status jalan ruas Atori-Haimaran-Moswaren- Teminabuan

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Akan dilakukan koordinasi dengan Direktur Jendral Bina Marga



KEGIATAN STRATEGIS 15

Pada tanggal **30 April 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya menghadiri kegiatan **Pemaparan Hasil Studi Dana Otonomi Khusus**.

Hasil kegiatan :

1. RIPPP (Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua) masih belum dipahami dengan baik oleh stake-holder baik di tingkat daerah maupun
2. Perencanaan pengadaan barang dan jasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk wilayah Papua secara baik maka hasil yang dicapai akan lebih baik

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua



Capaian





CAPAIAN

Pada bulan April 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya mencatat sejumlah capaian kinerja strategis melalui pelaksanaan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi), khususnya dalam mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan serta pembangunan sinergitas lintas sektor.

Capaian utama difokuskan pada kegiatan pendampingan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan serta rencana implementasi program-program strategis. Pendampingan ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan konsultasi, rapat koordinasi dan fasilitasi teknokratik lintas sektor, yang bertujuan untuk memastikan integrasi visi misi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Selama periode bulan April ini, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya berhasil :

1. Melakukan pendampingan aktif terhadap Pemerintah Kota Sorong dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus), sekaligus menyediakan analisis tematik dan review rancangan dokumen perencanaannya;
2. Mendorong terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah yang mengacu pada dokumen RIPPP Tahun 2022-2041 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
3. Melakukan penajaman indikator dan sasaran pembangunan yang inklusif terhadap masyarakat asli Papua (OAP);
4. Melakukan penajaman capaian pembangunan dengan berdasar pada baseline angka;
5. Melakukan kolaborasi antara BP3OKP dengan Pemerintah Daerah se-Papua Raya, untuk pelaksanaan Rapat Kerja Daerah yang menghasilkan 9 poin kesepakatan;
6. Melakukan penguatan sinergitas lintas OPD dan LSM secara aktif.

Melalui uraian capaian di atas, ke depan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya akan terus memperkuat peran strategisnya dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan di tingkat daerah mampu menjawab tantangan pembangunan Papua secara menyeluruh dan terintegrasi.

Penutup

Demikian penyampaian **Laporan Percepatan Pembangunan Papua**
Periode Bulan **April 2025** **Badan Pengarah Percepatan**
Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua
Barat Daya.

